



**KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULEN RAPAT**

**Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020**

*Topik: Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan  
pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah*

**1. Pelaksanaan**

Hari/ Tanggal : Senin, 20 Agustus 2018  
Waktu : 09.00-11.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat 204

**2. Pimpinan Rapat** : Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian  
PPN/Bappenas

**3. Peserta Rapat** :

1. Pusdatin, Kementerian Kesehatan
2. Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri
3. Biro Perencanaan, Kemendagri
4. Direktorat Fasilitas Kepala Daerah, Ditjen Otda, Kemendagri
5. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas
6. *Indonesia Corruption Watch* (ICW)
7. Sekretariat Open Government Indonesia

**4. Pembahasan Rapat**

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L .
3. Kemkes juga bukan kali ini saja menjadi penanggungjawab dalam renaksi OGI. Pada tahun 2016-2017. Aksi tersebut berkaitan dengan Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian

Kesehatan. Target dalam aksi tersebut dapat tercapai 100 persen, bahkan terjadi jumlah peningkatan yang signifikan pada jumlah informasi yang diunduh dan akses website Kemkes.

4. Tujuan dari Renaksi ini adalah menyediakan keterbukaan informasi kamar, obat dan tenaga kesehatan yang valid pada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Informasi ini dapat disediakan melalui website maupun desktop di Puskesmas maupun RS milik pemerintah.
5. Latar belakang aksi ini muncul karena sulitnya penerima bantuan jaminan kesehatan dalam menggunakan fasilitas layanan kesehatan. Masyarakat kerap kali mendapatkan informasi terkait penuhnya kamar di rumah sakit, habisnya stok obat sehingga menyulitkan mereka untuk berobat. Untuk itu, dibutuhkan informasi yang update baik berbasis website maupun dasbor yang dapat menyediakan status kamar ataupun pelayanan lainnya. Hal ini juga mencegah terjadinya praktik pencaloan pada akses layanan kesehatan.
6. Pusdatin Kemkes sudah memiliki data terkait dengan jumlah rumah sakit, puskesmas dan obat dalam bentuk database. Data tersebut juga dapat diakses oleh masyarakat
7. Terkait dengan data publikasi rumah sakit Kemkes sudah memiliki system SIM RS dan SIRANAP sebagai salah satu platform informasi terkait ketersediaan kamar. SIM RS sendiri sudah terhubung dengan 400 rumah sakit dan 1000 puskesmas. Namun, memang penggunaan system ini juga belum familiar dikalangan masyarakat
8. Selain memiliki SIM RS, Kemkes juga menginisiasi beberapa aplikasi, salah satunya aplikasi informasi obat yang bisa diakses melalui ponsel pintar. Selanjutnya, pengembangan aplikasi juga akan diimplementasikan melalui *cyber through*, integrasi data bidang kesehatan dengan lokasi pariwisata.
9. Di sisi lain, rumah sakit di daerah justru telah mengembangkan aksi ini. Rumah sakit Provinsi NTB dan Purwokerto memiliki bed management system sebagai bentuk transparansi dan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Berangkat dari inovasi tersebut harapannya kegiatan serupa juga dapat diimplementasikan oleh daerah lainnya melalui intervensi kebijakan dari pusat.
10. Dalam implementasi ini juga dapat mendorong rumah sakit dan puskesmas untuk memulai menggunakan dasbor ketersediaan kamar di rumah sakit.

11. Usulan indikator untuk aksi ini, Kemkes dapat membuat himbauan tertulis kepada rumah sakit maupun puskesmas untuk mulai menampilkan informasi layanan kesehatan.
12. Pada tahapan selanjutnya, perlu untuk dilakukan pertemuan bilateral lanjutan untuk melakukan finalisasi tentang sasaran akhir dan indikator capaian. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dituangkan dalam template untuk Renaksi OGI 2018-2020.

Notula Rapat

Tities Eka A.

### Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

Latar Belakang :

Masyarakat kerap kali merasa kesulitan untuk mengakses informasi ketersediaan kamar, obat dan layanan kesehatan lainnya. Walaupun Kemkes memiliki SIM RS dan SIRANAP namun keduanya belum dapat diakses oleh publik.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	Tersedianya informasi yang valid dan <i>real time</i> terkait ketersediaan obat, tenaga medis, kamar dan fasilitas kesehatan lainnya	Tersedianya informasi tentang ketersediaan layanan kesehatan (kamar, dokter, obat, dan lain sebagainya) di "xx" rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri